



**PERBANDINGAN PENERAPAN TINDAKAN PENYADAPAN
OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

HAKIM PANCA PUTRA

1910611183

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERBANDINGAN PENERAPAN TINDAKAN PENYADAPAN
OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

HAKIM PANCA PUTRA
1910611183

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH
NIP. 195807121983031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Hakim Panca Putra

NPM : 1910611183

Program Studi : S1-Hukum

Judul : Perbandingan Penerapan Tindakan Penyardapan Oleh Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Beniharmoni H, SH.,MH

Ketua

Kayus Kayowuan, SH, MH

Anggota 1

Dr. Suherman, S.H., LL.M

Dekan

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH

Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Juli 2023

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Hakim Panca Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/22 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo, Gg. Mangga, RT07/RW08, No. 16, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, 13640.
Nomor HP : 085811860639
Email : hakimpancap@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Jataon Nainggolan
b. Ibu : Doris Hosiana Sidabutar

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Santo Markus I (Lulus Tahun 2013)
2. SMP : SMPN 180 Jakarta (Lulus Tahun 2016)
3. SMA : SMAN 14 Jakarta (Lulus Tahun 2019)
Konsentrasi : Hukum Pidana
Semester : 8 (Delapan)
Jumlah SKS Lulus : 141 SKS

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Tim Mahasiswa Kampus Mengajar di SD Katolik Nusa Melati (Agustus 2021 – Desember 2021)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Hakim Panca Putra

NIM : 1910611183

Tanggal : 19 Juni 2023

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hakim Panca Putra
NPM : 1910611183
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : S1-Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Perbandingan Penerapan Tindakan Penyardapan Oleh Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Juni 2023



Hakim Panca Putra

NIM. 1910611183

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Perbandingan Penerapan Tindakan Penyadapan Oleh Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Jataon Nainggolan dan Ibu Doris Hosiana Sidabutar selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan secara penuh baik dalam bentuk moril maupun materil.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Jakarta, 19 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized representation of the author's name.

Hakim Panca Putra

NIM. 1910611183

ABSTRAK

Penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia terutama hak atas privasi. Walaupun melanggar hak asasi manusia, penyadapan masih dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana untuk mencari bukti-bukti dari suatu perkara pidana. Namun, pengaturan yang ada terdapat beberapa perbedaan penerapan tindakan penyadapan antara KPK dengan Kepolisian ataupun Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan penerapan penyadapan yang ada di Indonesia dan mendalami apakah pengaturan penyadapan harus disatukan dalam satu undang-undang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai sumber data. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menerangkan bahwa, 1) di Indonesia, pengaturan mengenai penyadapan banyak tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan yang ada saat ini masih belum mengatur mengenai penerapan penyadapan secara komprehensif sehingga pengaturan yang ada masih dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. 2) Penerapan penyadapan yang ada pun memiliki ketidakseimbangan antara lembaga penegak hukum sehingga menimbulkan beberapa problematika. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai penyadapan harus dilakukan pembaharuan agar dapat memberikan kepastian hukum. Ada dua hal yang dapat dilakukan terkait pembaharuan mengenai penerapan penyadapan oleh penegak hukum, yaitu pembaharuan KUHAP dan perancangan undang-undang mengenai penyadapan.

Kata Kunci : Penerapan Penyadapan, Penegak Hukum, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Wiretapping is an act that violates human rights, especially the right to privacy. Even though it violates human rights, wiretapping can still be carried out by law enforcement officials in the criminal justice process to seek evidence from a criminal case. However, the existing regulations have several differences in the application of wiretapping between the Corruption Eradication Commission and the Police or the Attorney General's Office. Based on this, the authors conducted a study aimed at comparing the implementation of wiretapping in Indonesia and exploring whether wiretapping arrangements should be integrated into one law. The author uses a normative juridical research method where the writer uses literature studies and interviews as data sources. The results of research conducted by the author explain that in Indonesia, regulations regarding wiretapping are widely scattered in various laws and regulations. However, the current regulations do not yet regulate the application of wiretapping in a comprehensive manner, so that existing regulations can still be abused by law enforcement officials. The existing application of wiretapping also has an imbalance between law enforcement agencies, causing several problems. Therefore, the author is of the opinion that the regulation regarding wiretapping must be renewed so that it can provide legal certainty. There are two things that can be done regarding the reform regarding the application of wiretapping by law enforcement, namely the reform of the Criminal Procedure Code and the drafting of a law regarding wiretapping.

Keywords : *Wiretapping Application, Law Enforcement, Legal Certainty*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	7
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	11
B. Tinjauan Teori	15
BAB III	39
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	39
A. Penerapan Penyadapan oleh Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	39
B. Penyatuan Pengaturan Tentang Penyadapan oleh Penegak Hukum di Indonesia	50
BAB IV	56
PEMBAHASAN	56
A. Perbandingan Penerapan Penyadapan oleh Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	56
B. Pentingnya Penyatuan Pengaturan Tentang Penyadapan oleh Penegak Hukum di Indonesia	76
BAB V	87

PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90